

**RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN KELOMPOK SADAR
WISATA DALAM PENGELOLAAN *COMMON POOL RESOURCES***

EMBUNG NGLANGGERAN

**(Studi di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

SRI AMELIA MUFTI

20520009



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN JUDUL

**RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN KELOMPOK SADAR
WISATA DALAM PENGELOLAAN *COMMON POOL RESOURCES***

EMBUNG NGLANGGERAN

*(Studi di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**

Disusun Oleh :

SRI AMELIA MUFTI

20520009

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2024
Jam : 10.30
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Ketua/Pembimbing



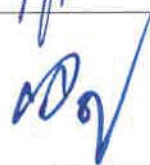
2. Analius Giawa, S.IP., M.Si

Penguji Samping I



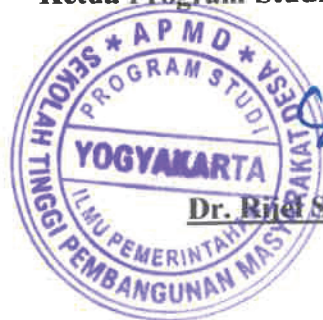
3. Dr. Rijel Samaloisa

Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan Hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Sri Amelia Mufti
NIM 20520009
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Relasi Pemerintah Kalurahan Dan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan *Common Pool Resources* Embung Nglanggeran (Studi Di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta) ini sepenuhnya adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber yang digunakan atau diacu telah diakui dan dikutip dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini saya nyatakan dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi akademik berupa pencabutan skripsi saya dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut.

Yogyakarta, 12 Januari 2024



Sri Amelia Mufti

NIM. 20520009

MOTTO

“...Sesungguhnya Allah bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.”

(QS. Asy-Syu'ara' 26:62)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga akan lupa betapa pedihnya rasa sakit.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Prosesnya memang melelahkan hingga seakan-akan ingin menyerah. Namun, berjuanglah dan percayalah jika Allah telah berkata “Kun Fayakun”, maka tidak ada yang mustahil”

(Sri Amelia Mufti)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Relasi Pemerintah Kalurahan Dan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Common Pool Resources Embung Nglanggeran (Studi Di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta) ini dengan baik dan lancar. Dukungan dan semangat dari berbagai pihak kepada penulis yang membuat skripsi ini terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Ayahanda Mufti Aprian dan Ibunda Sofiah serta kedua adik saya yang saya cintai Hanna Rahima dan Amira Fitri, terima kasih karena telah memberikan cinta dan kasih sayang begitu besarnya kepada saya, yang senantiasa memotivasi, memberikan dukungan lahir dan batin serta senantiasa mendoakan saya, begitu besar dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Saya sangat bersyukur telah dilahirkan ke dunia menjadi putri dari Ayahanda Mufti Aprian dan Ibunda Sofiah.
2. Sahabat saya Genta Syakira, Oca Mareta, Tahsya Tria Putri, Stevy Ariska, Nabila Putri Ananda, Anggun Julaita, Masayu Melinda, Ivana Vidya Rosa, Faidzah Dwi Saputri, Indah, Inka, yang selalu mendukung dan mendoakan saya, menjadi tempat bercerita dan bercanda tawa, dan memberikan saran serta motivasi kepada saya, terima kasih sudah menjadi sahabat yang tulus dan baik di dalam hidup saya.

3. Seluruh teman-teman seperjuangan saya Ratri, Litan, Valen, Vero, Putri Emren, Valdo, Agus, Fatchul, beserta teman-teman lainnya selama proses perkuliahan ini yang selalu mendukung dan mensupport saya hingga menyelesaikan skripsi ini. Serta Amigos Dava Valentino yang selalu menemani, memberikan dukungan dan dorongan yang tak tergoyahkan sepanjang perjalanan saya. Terima kasih atas kesabaran dan kasih sayang yang diberikan. Terima kasih selalu memotivasi yang baik dan memberi dukungan waktu, tenaga, materi dan pikiran selama perjalanan saya hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Kampus tercinta STPMD “APMD” yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu, belajar, dan membuat pengalaman berharga selama perkuliahan untuk meraih cita-cita.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Relasi Pemerintah Kalurahan Dan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Common Pool Resources Embung Nglanggeran (Studi Di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta) ini dengan baik dan lancar. Dukungan dan semangat dari berbagai pihak kepada penulis yang membuat skripsi ini terselesaikan. Sehingga, dalam kesempatan ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Rijel Samaloisa Ketua program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan gagasan beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Analius Giawa, S.IP., M.Si sebagai Dosen Penguji Samping I, yang telah memberikan arahan, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Rijel Samaloisa sebagai Dosen Penguji Samping II, yang telah memberikan arahan, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si. Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan arahnya maupun nasihat-nasihat selama perkuliahan.

7. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmunya dan membimbing penulis selama perkuliahan di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah Kalurahan Nglanggeran, Pokdarwis Nglanggeran dan masyarakat Nglanggeran yang sudah mempersilahkan ruang dan waktunya kepada saya untuk menyelesaikan penelitian di Nglanggeran.
9. Para peneliti dalam karya ilmiahnya yang dikutip dan dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat sedikit membantu menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya baik dari segi EBI, kosakata, tata bahasa maupun isi. Oleh karena itu, masukan-masukan baik berupa kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Januari 2024



Sri Amelia Mufti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Literatur	8
F. Kerangka Konseptual.....	15
1. Relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam Pengelolaan Embung Nglanggeran	16
2. Pengelolaan <i>Common Pool Resources</i> (CPR) Embung Nglanggeran dan dampaknya bagi kemakmuran warga.....	24
G. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Objek Penelitian	32
3. Subjek dan Lokasi Penelitian	33

4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
5. Teknik Analisis Data.....	36
BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN.....	39
A. Sejarah Kalurahan	39
B. Kondisi Geografis	40
C. Kondisi Demografis	42
D. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya.....	45
E. Visi Dan Misi Kalurahan	46
F. Struktur Organisasi Kalurahan.....	47
G. Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).....	49
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam Pengelolaan Embung Nglanggeran	56
B. Pengelolaan <i>Common Pool Resources</i> (CPR) Embung Nglanggeran dan dampaknya bagi kemakmuran warga.....	75
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan	34
Tabel 2. 1 Batas Wilayah Administrasi Kalurahan Nglanggeran	40
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Nglanggeran	42
Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Gambar 2. 3 Embung Nglanggeran.....	51
Gambar 2. 4 Gunung Api Purba Nglanggeran	52
Gambar 2. 5 Air Terjun Kedung Kandang.....	53
Gambar 2. 6 Griya Coklat Nglanggeran	54
Gambar 2. 7 Edukasi Peternakan Kambing Etawa	55

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Nglanggeran.....	48
Bagan 2. 2 Struktur Organisasi Pokdarwis	50

INTISARI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan Pemerintah Kalurahan sebagai representasi mandat warga desa. Dalam Undang-undang desa, Pemerintah Kalurahan berhak untuk mengatur dan mengurus kewenangan desa dan mendistribusikan kesejahteraan termasuk mengelola sumber daya milik bersama (*common pool resources/CPR*). Embung Nglanggeran merupakan contoh CPR di Desa Wisata Nglanggeran. Embung ini digunakan untuk irigasi perkebunan durian dan kelengkeng yang ada di sekitar embung. Namun, pemanfaatan Embung Nglanggeran hanya diprivatisasi oleh sekelompok orang/komunitas, yaitu Pokdarwis dan Kelompok Tani Kebun Buah Nglanggeran. Apabila mengacu pada hakikatnya, pemanfaatan Embung Nglanggeran seharusnya digunakan sebagai sumber air irigasi bersama yang tujuannya adalah untuk kepentingan seluruh warga dan bukan kepentingan kelompok tertentu. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui relasi Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata di dalam Pengelolaan Embung Nglanggeran dan mengetahui model pengelolaan Embung serta dampaknya bagi kemakmuran warga.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 9 orang terdiri dari Pemerintah Kalurahan, Pokdarwis, masyarakat, Kelompok Tani Kebun Buah, dan pelaku usaha di Embung Nglanggeran. Objek pada penelitian ini adalah Relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam pengelolaan Embung Nglanggeran. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian diketahui pertama, model relasi antara Pemerintah Kalurahan dengan Pokdarwis termasuk ke dalam model relasi dominasi oleh Pokdarwis. Masih lemahnya fungsi dan peran Pemerintah Kalurahan di dalam pengelolaan embung sebagai regulator, distribusi dan proteksi serta pengawas pengelolaan embung memperlihatkan semakin kuatnya Pokdarwis sebagai kelompok pengelola embung. Hal ini karena tidak adanya kebijakan pengelolaan embung yang seharusnya diatur oleh Pemerintah Kalurahan. Temuan penelitian menemukan bahwa terdapat pihak supradesa yang mempengaruhi relasi menjadi tidak ideal. Kedua, model pengelolaan embung yang digunakan merupakan model Elionor Ostrom, dimana pengelolaan CPR dilakukan oleh komunitas lokal/masyarakat pengguna yaitu Pokdarwis dan Kelompok Tani Kebun Buah Nglanggeran. Namun pada kenyataan di lapangan, komunitas tersebut malah mendominasi CPR. Aturan penggunaan air embung pun dibuat dalam kesepakatan para kelompok tani yang juga anggota Pokdarwis. Meskipun dalam pengelolaannya dihadapi dengan berbagai tantangan, pengelolaan Embung Nglanggeran sudah dapat memberikan dampak positif terhadap kemakmuran warga lokal dilihat dari aspek hidup dimana peningkatan kualitas hidup terjadi, aspek kehidupan dimana budaya kegotongroyongan dijunjung, dan aspek penghidupan dimana banyaknya lapangan kerja memberikan peningkatan perekonomian warga di Nglanggeran.

Kata Kunci: *Pemerintah Kalurahan, Pokdarwis, dan Common Pool Resource*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi pariwisata salah satunya sumber daya air milik desa yaitu embung, mempunyai potensi besar untuk diinovasi agar menjadi sumber pendapatan warga lokal. Inovasi tersebut dapat berupa arena pemancingan, retribusi tiket dan parkir, spot-spot tempat foto, *event* dan lain-lain. Apabila pengelolaann potensinya dilakukan dengan baik, maka embung dapat memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya pendapatan warga lokal. Salah satu desa wisata yang memiliki potensi pariwisata sumber daya air unggulan adalah Kalurahan Nglanggeran di Gunungkidul.

Kalurahan Nglanggeran merupakan sebuah desa yang berada di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa tersebut mempunyai beberapa wisata unggulan salah satunya adalah Embung Nglanggeran. Embung atau danau buatan ini dibangun diatas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan diresmikan langsung pada 19 Februari 2013 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Embung Nglanggeran adalah danau buatan yang utamanya digunakan untuk irigasi kebun buah di sekitar embung. Sehingga, Embung Nglanggeran juga merupakan sumber mata air yang sekaligus menjadi objek wisata unggulan di Kalurahan Nglanggeran.

Hal menarik yang terdapat pada Embung Nglanggeran yaitu di dalam pengelolaannya dilakukan oleh institusi lokal. Institusi lokal tersebut adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Pokdarwis Nglanggeran

sudah berhasil mengelola potensi desanya hingga sampai meraih penghargaan internasional, terlihat dari beraneka macam prestasi yang dicapai oleh Kalurahan Nglanggeran antara lain Desa Wisata Terbaik di Indonesia tahun 2017, Penghargaan Pariwisata Berbasis Komunitas ASEAN (CBT), Sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan dari Kemenparekraf pada tahun 2021, dan Desa Wisata Terbaik 2021 dari *World Tourism Organization* milik PBB (UNWTO). Penghargaan-penghargaan tersebut diberikan atas prestasi Kalurahan Nglanggeran dalam mengembangkan potensi wisata dan mempromosikan praktik pariwisata yang berkelanjutan. Kalurahan Nglanggeran telah menjadi contoh bagi desa-desa lain yang hendak memajukan desa wisata mereka.

Di dalam pengelolaan embung Nglanggeran prosesnya perlu menganut relasi dimana di dalam proses tersebut terdapat keterlibatan Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis hingga masyarakat itu sendiri. Relasi ini merupakan hubungan yang terjadi di antara dua pihak yang terlibat dalam aktivitas tertentu. Gary Yukl (1991) mendefinisikan relasi atau hubungan harmoni berarti pihak pertama dan kedua berada di level yang sama dan seimbang di mana mereka saling memiliki sikap percaya satu sama lain, bekerjasama dan menghargai sesamanya (Yukl & Falbe, 1991). Relasi dikatakan berhasil ketika *stakeholders* yang terdapat di dalam prosesnya saling bekerja sama serta berpartisipasi di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, di dalam relasi antara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis sekarang ini menemui beberapa permasalahan dan hambatan di dalamnya, terutama ketika ada peran dari salah satu pemangku kepentingan yang belum optimal.

Dalam upaya pengelolaan Embung Ngglanggeran, perlu adanya relasi yang harmoni antara Pemerintah Kalurahan dengan Pokdarwis. Relasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wisata dan memberikan manfaat bagi warga lokal. Dalam relasi ini, Pemerintah Kalurahan memiliki peran sebagai pendamping, regulator, distribusi, fasilitator, proteksi dan pengawas dalam pengelolaan Embung Ngglanggeran. Sedangkan Pokdarwis memiliki peran sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, melaksanakan, mengelola, mempromosikan dan mendistribusi sumber daya lokal maupun objek wisata.

Namun, pengelolaan Embung Ngglanggeran masih sangat tersentralisasi pada Pokdarwis. Hal ini terjadi akibat kurangnya kehadiran dari Pemerintah Kalurahan dalam mengelola embung tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua Pokdarwis Ngglanggeran yaitu Mursidi, kontribusi dari Pemerintah Kalurahan belum maksimal, dikarenakan dari Pihak Pemerintah Kalurahan belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan Embung terutama belum adanya peraturan desa tentang pengelolaan embung Ngglanggeran. Embung ini dikatakan adalah embung yang pengelolaannya berbasis warga lokal dan sudah meraih banyak penghargaan bagi desanya. Namun pada kenyataannya di lapangan, Embung Ngglanggeran dikelola dengan pendekatan berbasis komunitas sekitar. Pada awalnya Embung di Ngglanggeran bukan diperuntukkan sebagai kegiatan kepariwisataan, tujuan awal dibangunnya embung tersebut adalah guna penampungan air hujan, sehingga di musim kemarau, para petani kebun buah dapat menyirami tanaman durian dan kelengkeng yang berada di sekitar embung. Namun, terdapat permasalahan

yang terjadi di dalam pengelolaan embung yaitu adanya ketidakadilan dalam pemanfaatan embung Nglanggeran. Hanya Pokdarwis dan kelompok tani yang boleh memanfaatkan air embung untuk keperluan irigasi, sedangkan masyarakat awam di Kalurahan Nglanggeran tidak mempunyai akses untuk menggunakan air tersebut dalam aktivitas pertaniannya, seperti kegiatan pertanian sawah, budidaya ikan atau pertanian lainnya. Ketidakmerataan pembagian distribusi sumber daya ini dapat menyebabkan konflik internal antara warga dengan komunitas, hal ini karena sumber daya umum seperti embung Nglanggeran harus dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendistribusikan, mengatur, mengelola, dan melindungi kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan embung Nglanggeran.

Embung Nglanggeran adalah salah satu contoh *Common Pool Resources* atau sumber daya milik bersama yang disebut CPR. CPR adalah sumber daya alam yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang atau masyarakat, dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa batasan tertentu. CPR dapat berupa sumber daya alamiah seperti air, hutan, pertanian, dan sebagainya. Namun, penggunaan CPR yang tidak dikelola dengan tepat akan bisa memicu permasalahan seperti overuse, degradasi, serta konflik antar pengguna. Beberapa ahli yang mempelajari CPR salah satunya adalah Elinor Ostrom. Elinor Ostrom adalah seorang ilmuwan sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat dapat mengelola CPR secara efektif tanpa mengalami degradasi. Ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki akses dan kontrol terhadap CPR dapat mengelolanya dengan baik melalui aturan-aturan yang disepakati bersama.

Embung Nglanggeran merupakan salah satu contoh CPR di Desa Wisata Ngglanggeran. Embung ini merupakan sumber air bagi masyarakat sekitar yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan yang ada di sekitar embung. Embung Nglanggeran merupakan sumber mata air yang sekaligus menjadi objek wisata unggulan di Kalurahan Nglanggeran. Sehingga, Embung Nglanggeran memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sumber air bersama dan objek wisata. Namun, pemanfaatan Embung Nglanggeran hanya diprivatisasi oleh sekelompok orang/komunitas, salah satunya adalah Pokdarwis dan Kelompok Tani.

Akan tetapi apabila mengacu pada hakikatnya, yaitu teori CPR Ostrom dimana pengelolaan CPR dilakukan oleh warga pengguna/komunitas lokal yang kelembagaannya dapat memproteksi CPR dan mengelola agar hasilnya terdistribusi secara efisien dan adil. Pemanfaatan Embung Nglanggeran seharusnya digunakan sebagai sumber mata air bersama yaitu yang tujuannya untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan kelompok tertentu. Sehingga, penggunaan embung yang tidak dikelola secara tepat akan bisa memicu permasalahan atau konflik antar pengguna. Sehingga, diperlukan bentuk mengelola yang tepat dan aturan-aturan yang disepakati bersama agar embung Nglanggeran dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sekitar, tidak hanya Pokdarwis dan kelompok tani melainkan semua elemen masyarakat di desa wisata Ngglanggeran karena hakikat dari *Common Pool Resources* mengacu pada kepemilikan bersama, sehingga seluruh anggota masyarakat yang ada di sekitarnya memiliki hak di dalam mengakses, mengelola, menjaga dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara bersama-sama.

Oleh karena itu, di dalam suatu keberhasilan relasi aktor yang mengelola embung perlu dilibatkan semua peran dari setiap aktor yang terlibat di dalamnya, dimana Pokdarwis bukanlah menjadi satu-satunya aktor yang berperan penting melainkan pula Pemerintah Kalurahan, dan warga yang saling bekerja sama agar tercapai pengelolaan embung yang adil dan berkelanjutan sebagai *Common Pool Resources resources (CPR)*.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang terjadi, maka peneliti berkeinginan guna menelusuri lebih dalam mengenai relasi pengelolaan dan pemanfaatan CPR Embung Nglanggeran. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: Relasi Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan *Common Pool Resources* Embung Nglanggeran.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas sebagai acuan, maka rumusan masalah penelitiannya yakni: Bagaimana relasi antara Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengelolaan Embung Nglanggeran?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan digunakan di dalam proposal penelitian ini antara lain:

1. Relasi Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Embung Nglanggeran
2. Pengelolaan *Common Pool Resources (CPR)* Embung Nglanggeran dan dampaknya bagi kemakmuran warga

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan acuan dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan dan nantinya menjadi pokok pembahasan di dalam proposal, maka didapat tujuan penelitian di antaranya:

1. Untuk mengetahui relasi Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata di dalam Pengelolaan Embung Nglanggeran
2. Untuk mengetahui pengelolaan *Common Pool Resources* Embung Nglanggeran dan dampaknya bagi kemakmuran warga

Kemudian melalui penelitian ini peneliti harapkan pula bisa diperoleh manfaat yakni:

1. Sebagai sebuah tulisan ilmiah, temuan penelitian ini peneliti harapkan dapat sedikit memberi manfaat terhadap pengelolaan *common pool resources* bagi Pemerintah Kalurahan Nglanggeran
2. Hasil penelitian peneliti, peneliti harapkan bisa menjadi salah satu acuan maupun sarana referensi untuk peneliti lainnya apabila tertarik dan berkeinginan melakukan penelitiannya dengan topik relasi Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Embung dan *Common Pool Resources* maupun topik penelitian berikutnya yang sejenis.

E. Kajian Literatur

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji mengenai pengelolaan sumber daya bersama, perihal desa wisata dan *governance* dalam pengelolaan objek wisata dan sumber daya lokal di desa.

Pertama, Penelitian yang berjudul “Sumber Daya Bersama, Kontestasi, Hadirnya Spirit Berdesa: Studi Kasus Pengelolaan Telaga Jonge Desa Pacarejo, Kabupaten Gunungkidul”, yang dilakukan oleh Agustinus Sakro. Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Governabilitas, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan konflik yang ditimbulkan oleh Pokdarwis setempat yang melakukan privat atas CPR dan Pemerintah Kalurahan yang berupaya melindungi CPR. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatannya kelembagaan dan model studi kasus. Temuan penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan wisata Telaga Jonge menunjukkan adanya campur tangan pihak swasta. Pada saat yang sama, baik negara maupun desa tidak dirasakan kehadirannya dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Sedangkan kelompok sadar wisata memprivatisasi sumber daya tersebut melalui proyek desa wisata. Sehingga, terjadi konflik internal antara Pemerintah Kalurahan, Pokdarwis dan warga. Kasus tersebut terjadi karena adanya lembaga berbasis Masyarakat (Pokdarwis) yang memprivatisasi sumber daya bersama milik desa dan tidak adanya keikutsertaan desa di dalamnya. Sebagai tanggapan solutif, Pemerintah Kalurahan melakukan alternatif solusi dengan rekayasa sosial dan Telaga Junge dikembalikan kepada desa.

Kedua, Jurnal E-SOSPOL dengan penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Etho Carnival”, yang dilakukan oleh Harmawan, Volume IV, Nomor 1, Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan teori *Collaborative Governance*. Peneliti mendeskripsikan tata kelola kolaboratif dengan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan lokal pada Karnaval Etno Banyuwangi. Hasil penelitiannya yakni Pemangku kepentingan yang terlibat dalam BEC dari 2011-2014 memiliki pola kerjasama yaitu kemitraan pemerintah-swasta (Harmawan et al., 2017).

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu” yang dilakukan oleh Kirana dan Artisa. Dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2020. Penelitian ini lebih lanjut menjelaskan tentang peran dan kerjasama para aktor/pihak yang terlibat untuk membentuk kerjasama dalam proses pengembangan desa wisata (Kirana & Artisa, 2020). Jenis penelitiannya adalah eksploratif kualitatif. Adapun hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tersebut melibatkan banyak stakeholders yaitu pemerintah, swasta, media massa, akademisi kampus serta masyarakat. Penerapan tata kelola kolaboratif berhasil dilakukan karena setiap stakeholders memahami peran dan fungsinya dalam pengembangan desa wisata

Keempat, penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang” yang dilakukan oleh Bagus Sanjaya. Dipublikasikan dalam JUMPA, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori desa

wisata. Di dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bagaimana potensi pariwisata dengan berbasis masyarakat. Temuan penelitiannya adalah Desa Kemetul memiliki banyak tempat yang berpotensi menjadi objek pariwisata. Pengembangan Desa Wisata dilakukan dengan berbasis masyarakat, dimana masyarakat mulai terlibat dari perencanaan hingga yang menikmati hasilnya (Sanjaya, 2018).

Kelima, penelitian yang berjudul “Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta” yang dilakukan oleh Giat Tri Sambodo dan Ulung Pribadi. Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2016. Hasil dari penelitian menunjukkan bawasannya kolaborasi yang terjadi di Desa Brosot hampir sama dengan model dari Ansell dan Gash, akan tetapi terdapat pengaruh faktor budaya di dalam prosesnya. Penelitian ini menjelaskan bahwa Faktor budaya yang mempengaruhi adalah hubungan kekeluargaan, kegiatan arisan, diskusi, nggih ra kepenggih, gotong-royong, mokogi, ngombyongi dan mosobodao, dan orang yang ada di sekitar (Sambodo & Pribadi, 2016).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Winasis Agus dan Setyawan Dody. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA)”. Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016. Dalam jurnal ini, jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Di dalam jurnal ini, hasil penelitiannya adalah pengembangan desa wisata dengan meningkatkan SDAny sudah berhasil dilakukan. Peneliti menjelaskan

bagaimana proses pengembangan desa wisata Punten melalui proses kelembagaan yang dimana membentuk Pokdarwis, Gapoktan, serta adanya jejaring kerjasama dengan Jawa Timur Park serta Lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya (Winasis & Setyawan, 2016). Setiap aktor saling berkolaborasi dalam pengembangan desa wisata dengan mendistribusi peran dan fungsi dari setiap pemangku kepentingan di dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Ketujuh, penelitian yang berjudul “*The Commons* Dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam Desa Bleberan Gunungkidul” yang dilakukan oleh Fatih Gama Abisono, Tridaya Rini, dan Agustinus Sakro. Dipublikasikan dalam *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2020. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik mengenai pengelolaan sumber daya bersama di Bleberan bersumber pada formasi warga yang kontroversial tetapi tidak memiliki kekuatan negosiasi yang memadai. Lemahnya kekuatan negosiasi mengenai bagaimana keanggotaan, hak dan beban masyarakat dikelola mempengaruhi perdebatan sumber daya bersama sehingga menimbulkan tragedi privatisasi oleh sebagian kelompok. Jurnal ini menyimpulkan dengan merangkum pentingnya menelusuri perspektif kewargaan sebagai dasar untuk menemukan peta jalan penyelesaian konflik atas pengelolaan sumber daya bersama.

Kedelapan, penelitian yang berjudul “Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air” yang dilakukan oleh Amelia Ari Putri dan Martua Sihaloho. Dipublikasikan dalam *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, Volume 2, Nomor 5, Tahun 2018.

Penelitian ini menganalisis dampak penggunaan air masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya akses terhadap sumber daya air mempengaruhi rendahnya kondisi sosial ekonomi rumah tangga (Putri & Sihaloho, 2018). Penguasaan sumber daya air telah beralih dari kepemilikan publik menjadi penguasaan dan privatisasi oleh perusahaan swasta yaitu AMDK. Hak masyarakat atas sumber daya air termasuk dalam kategori rendah karena masyarakat memiliki keterbatasan akses dan hak pengambilan terhadap sumber daya air. Hal ini disebabkan oleh diterbitkannya izin kepada swasta untuk menguasai sumber air sehingga mengurangi akses masyarakat terhadap sumber air dan berujung pada konversi lahan sehingga memaksa sebagian masyarakat yang mulanya bertani beralih mata pencaharian menjadi kuli pabrik, kuli bangunan, dan pedagang sol sepatu.

Kesembilan, penelitian yang berjudul “*Social Learning Theory* dalam Pemodelan Pengembangan Wisata Embung Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon” yang dilakukan oleh Mukarto Siswoyo, Acep Komara, Dedi Muhammad Siddiq, Yandi Pratama Putra, dan Indah Lestari. Dipublikasikan dalam Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Embung Sarwadadi memiliki potensi daya tarik keindahan pemandangan disekitarnya, hamparan dan lokasi yang cukup luas sampai tiga puluh tiga hektar serta view jalan menuju lokasi embung yang apik. Namun, pengelolaan Embung Sarwadadi belum dapat dioptimalkan dan belum dapat dikelola menjadi potensi pariwisata yang mampu menambah pendapatan warga setempat. Kajian ini

menyimpulkan model pengelolaan yang baik bagi Embung Sarwadadi yaitu menerapkan model *community based tourism* atau pengelolaan embung yang berbasis masyarakat. Hal ini karena model pengelolaan embung tersebut memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan, pendapatan dan kemakmuran warga (Siswoyo et al., 2022).

Kesepuluh, penelitian yang berjudul “Germadan Rawa Pening: Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan *Common Pool Resources*”, yang dilakukan oleh S. Agung Sri Raharjo, Faiqotul Falah, dan S. Andy Cahyono. Dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019. Kajian tersebut memberi evaluasi terhadap implementasi Germadan dari sudut pandang teori tindakan kolektif. Germadan merupakan bentuk aturan dan gerakan mengelola danau dimana pembentukannya dengan membentuk lembaga-lembaga yang anggotanya dari berbagai *stakeholders* terkait (Raharjo et al., 2019). Temuan penelitian ini mengatakan bahwa Germadan sebagai aksi kolektif gagal dilakukan. Alasan kegagalan ini adalah belum sempurnanya partisipasi dari para pemangku kepentingan dalam menjalankan program, kurangnya upaya dalam menegakkan peraturan yang telah disepakati, dan kurangnya insentif ekonomi dan sosial dari para pemangku kepentingan dalam kelembagaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian peneliti sebagai sumber referensi bagi peneliti di dalam melakukan kegiatan penelitian. Terdapat sepuluh penelitian terdahulu dimana beberapa penelitian diantaranya menggunakan perspektif yang sama seperti

pada penelitian peneliti yakni perspektif *Governance* dimana teori yang digunakan peneliti sama yaitu perspektif *governance* Ansell dan Gash. Indikator collaborative governance yang digunakan terdiri dari dialog antar-muka seperti kegiatan rutinnnya; komitmen terhadap proses seperti kesepakatannya; dan membangun kepercayaan. Persamaan penelitian juga terletak pada beberapa penelitian dengan tema/topik yang sama dengan penelitian ini dimana mengkaji perihal desa wisata, dan pengelolaan sumber daya milik bersama/*common pool resource*.

Akan tetapi terdapat pula perbedaan pada penelitian yang terdahulu. Dimana dalam penelitian ini, *standing position* penelitian yang akan diteliti lebih melihat kepada relasi antar pihak, bagaimana kekuasaan tidak hanya dipegang oleh Pemerintah Kalurahan tetapi juga oleh Masyarakat dalam hal ini yaitu Pokdarwis dalam pengelolaan sumber daya bersama dan dampaknya dapat menjadi dilema bersama jika Pemerintah Kalurahan tidak membuat kebijakan untuk mendistribusikan pengelolaan sumber daya desa dan mengabaikan masalah sumber daya desa yang diprivatisasi. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan embung Nglanggeran berkelanjutan dan efektif.

Sehingga penelitian ini hendak melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan memperkaya wawasan pembaca. Kemudian, penelitian ini lebih mengkaji dari sudut pandang bagaimana model relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam pengelolaan sumber daya bersama serta melihat bagaimana pengelolaan *common pool resources* berdampak bagi kemakmuran warga dilihat dari 3 indikator kemakmuran yang lahir dari visi-

misi Gubernur DIY tentang reformasi Kalurahan yaitu hidup, kehidupan dan penghidupan. Dampak yang ada dapat menjadi positif namun dapat pula berdampak negatif bagi kemakmuran warga karena dapat menjadi *common dilemma* jika Pemerintah Kalurahan tidak membuat kebijakan untuk mendistribusikan pengelolaan sumber daya desa dan mengabaikan masalah sumber daya desa yang diprivatisasi.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menjawab persoalan mengenai relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam pengelolaan Embung Nglanggeran sebagai sumber daya bersama dan mengupas dampak pengelolaan *common pool resources* bagi kemakmuran warga. Relasi yang seimbang merupakan aspek penting dalam pengelolaan Embung Nglanggeran. Relasi yang ideal dalam pengelolaan embung Nglanggeran memerlukan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di dalamnya. Para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang berharga mengenai pengelolaan embung Nglanggeran dan dapat membantu mengidentifikasi potensi permasalahan yang terjadi. Embung Nglanggeran adalah salah satu contoh *Common Pool Resources* atau sumber daya milik bersama. Dalam tata kelola sumber daya bersama, semua peran dan fungsi dari setiap pemangku kepentingan harus seimbang agar tidak terjadi konflik atau perebutan sumber daya. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan memberikan manfaat bagi seluruh warga serta kesejahteraan warga setempat. Kerangka konsep ini akan menjadi jembatan penghubung berbagai macam konsep dalam menjelaskan tentang

relasi antar pihak dalam pengelolaan Embung Nglanggeran sebagai sumber daya milik bersama /*common pool resource* dan dampaknya bagi kemakmuran warga.

1. Relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam Pengelolaan Embung Nglanggeran

Sutoro Eko (2021) mendefinisikan pemerintahan adalah transformasi dari rakyat menjadi warga melalui proses politik, hukum, dan administrasi, sesuai dengan idealisme Sila ke-4 dan Sila ke-5 Pancasila. Sehingga, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh pemerintah dan untuk warga (Yunanto, 2021). Pemerintah yang berada dalam demokrasi menjadikan negara hadir, tidak hanya mengatur dan mengurus tetapi memberikan distribusi dan proteksi kepada warga. Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan subjek dalam menjalankan roda pemerintahan di desa (Sinar, 2022). Nglanggeran merupakan desa yang disebut dengan Kalurahan. Kalurahan merupakan panggilan lain untuk “desa” yang berada di wilayah DIY. Sehingga, Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang ketika menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh aparat kalurahan.

Kewenangan desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah otoritas bagi kalurahan sebagai perwakilan

“negara kecil” dalam berinovasi untuk kepentingan masyarakat desa. Undang-undang Desa menegaskan pada pemanfaatan potensi dan aset desa penting dilakukan untuk masyarakat sejahtera dan pencapaian kemakmuran bersama (Sinar, 2022). Dalam mengembangkan potensinya, desa diberi kewenangan sehingga memiliki wewenang dan akuntabilitas mengatur serta mengurus barang-barang publik sebagai pelayanan kepada kepentingan masyarakat setempat (Eko et al., 2017). Adapun yang menjadi kewenangan desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan desa meliputi menyelenggarakan, membangun desa, membina, dan memberdayakan masyarakat. Sehingga, desa memiliki otonomi untuk mengelola potensi yang dimiliki desa salah satunya potensi desa wisata.

Menurut Kurniawati, Hamid, dan Hakim (2018) di dalam penelitiannya, konsep Desa Wisata merupakan suatu kegiatan kepariwisataan. Desa Wisata merupakan objek pariwisata yang memberikan impact pada objek wisata unggulan yang ada di desa dan impact pada kehidupan masyarakat di desa. Sedangkan Desa sebagai subjek memiliki impact pada setiap kegiatan sosial budaya yang terdapat di desa, diperoleh dari partisipasi aktif masyarakat lokal untuk memberikan kelangsungan kegiatan pariwisata di desa. Nuryanti (1992) yang dikutip oleh Suhartanto (2019) menjelaskan bahwasanya “Desa Wisata adalah bentuk kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dimunculkan di dalam tata kehidupan warga lokal, di mana masyarakat saling menyatu di dalam suatu kebiasaan dan

tradisi yang sudah ada”. Nuryanti juga mengatakan bahwasanya dari seluruh unsur tersebut, unsur penting yang harus ada pada Desa Wisata adalah aspek akomodasi dan atraksi. Sehingga, dapat peneliti simpulkan bahwa desa wisata merupakan kegiatan kepariwisataan yang merupakan bentuk kombinasi meliputi akomodasi, atraksi, dan fasilitas pendukung yang memiliki daya tarik khusus dan bernilai budaya. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata memerlukan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan sebagai pondasi/tonggak kegiatan wisata di desa dimana pihak-pihak yang berkepentingan saling bekerja sama.

Sebagai desa wisata yang memiliki objek wisata salah satunya berupa Embung Nglanggeran, embung ini dikelola oleh institusi lokal setempat. Saat ini, Embung Nglanggeran dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Darwis (2016) mendefinisikan institusi lokal adalah lembaga yang diinisiasi oleh warga setempat dikarenakan terdapat suatu kebutuhan bagaimana mengakomodasi pengelolaan potensi dan kegiatan wisata yang ada di desa. Peran insitusi lokal ini perlu dilaksanakan sebagai upaya mengembangkan potensi yang ada dan dapat mengembangkan kapasitas warga setempat (Darwis et al., 2016). Seperti kajian yang dilakukan oleh Darwis (2016) membahas tentang Punggawa Ratu Pasundan yang merupakan institusi lokal di Desa Sukaratu dimana terdapat 4 peran institusi lokal di dalam mengembangkan potensi wisata dengan basis masyarakat diantaranya

yaitu fasilitator, mediator, menyampaikan informasi, dan mendayagunakan kegotongroyongan (Darwis et al., 2016).

Adapula kajian tentang perspektif kewargaan yang dapat pula diartikan sebagai perspektif institusi lokal, dimana kajiannya menguraikan relasi desa sebagai “negara kecil” dengan warganya. Kajian ini menyimpulkan pentingnya menggunakan perspektif kewargaan sebagai alternatif solusi mengelola bersama dalam tata relasi antara negara, warga, dan pasar ketika menghadapi isu pengelolaan *the commons* (Abisono et al., 2020). Kajian lainnya dilakukan oleh Petrus (2008), dimana institusi lokal dimaknai dengan wadah pengaturan untuk mengatur segala kegiatan bersama, fungsi dan peran setiap orang di dalamnya dan juga sebagai wadah penyelesaian masalah atau konflik yang diakibatkan kegiatan tersebut (Petrus, 2008).

Sutoro Eko (2014) dalam bukunya yang berjudul *Desa Membangun Indonesia* mendefinisikan Organisasi warga sebagai *civil institution*, sebuah institusi lokal yang pembentukannya secara mandiri dibentuk oleh warga, bertujuan untuk memperhatikan isu-isu publik (yang melampaui isu-isu parokhial dan adat-istiadat) serta sebagai wadah representasi dan partisipasi mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka (Eko et al., 2014). Dapat disimpulkan bahwa institusi lokal merupakan sebuah wadah dan pedoman dalam melakukan kegiatan mengelola potensi desa yang mencakup atas kepentingan warga dan tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Pokdarwis adalah salah satu *stakeholders* yang merupakan warga

setempat dan mempunyai peranan strategis dalam pengelolaan potensi alam maupun budaya suatu desa sebagai destinasi wisata (Putrawan & Ardana, 2019). Sehingga, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah institusi lokal yang berbasis warga dimana mereka bertujuan untuk mengelola kegiatan wisata dan mewadahi partisipasi warga yang sadar terhadap potensi wisata. Kemudian, Peran institusi lokal dapat dilihat pula dari aspek fasilitasi, mediasi, penyampaian informasi, dan gotong-royong (Darwis et al., 2016). Adapula kajian yang dilakukan oleh Putrawan dan Ardana (2019) tentang peran Pokdarwis dalam mengembangkan desa wisata diantaranya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang wisata, mewujudkan daya tarik wisata, serta penyampaian informasi (Putrawan & Ardana, 2019).

Selanjutnya, membahas terkait tata kelola atau yang sering disebut dengan *collaborative governance* merupakan aspek penting dalam pengelolaan Embung Nglanggeran. Davies dalam penelitiannya mendefinisikan *Governance* adalah suatu pendekatan pengambilan keputusan dan proses kolaborasi dengan serangkaian aktivitas bersama untuk menghasilkan tujuan dan strategi” (Davies & White, 2012). Kemudian, definisi lain dari *Governance* yaitu mencakup “semua aspek pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi”. Beda halnya dengan model kolaboratif maupun interaksi para pemangku kepentingan di mana organisasi dan aktor-aktor bertindak sebagai bagian dari strategi kebijakan, tata kelola mempertegas aspek

kepentingan dan kesepakatan kolegal dalam pembuatan kebijakan melalui "berbagi kekuatan" (Taylor & de Loë, 2012).

Seperti yang dipertegas pula oleh Dwiyanto dikutip oleh Putra dan Roni (2021) *governance* meliputi ketotalitasan dari seluruh lembaga maupun masyarakat, baik itu sektor pemerintah ataupun bukan pemerintah (Putra & Roni, 2021). Selanjutnya lebih spesifik Purnomo, Widiputranti, dan Hartono (2021) mendefinisikan bahwasanya ada tiga stakeholders yang terlibat di dalam kolaborasi, yaitu sektor pemerintah, sektor swasta, dan unsur masyarakat yang melakukan kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan (Purnomo et al., 2021). Dalam konteks ilmu pemerintahan, perspektif *governance* akan melihat bagaimana kekuasaan tidak hanya dipegang oleh Pemerintah Kalurahan tetapi juga oleh Masyarakat, Pokdarwis dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator *governance* yang digunakan terdiri dari dialog antar-muka seperti kegiatan rutinnnya; komitmen terhadap proses seperti kesepakatannya; dan membangun kepercayaan. Dalam penelitian ini akan lebih melihat relasi para pemangku kepentingan di dalam memastikan pengelolaan embung Nglanggeran berkelanjutan dan efektif.

Relasi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya bersama merupakan hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kalurahan dan warganya di dalam mengelola sumber daya yang diberikan oleh alam atau buatan untuk dipergunakan bagi masyarakat. Dalam relasi antara Pemerintah Kalurahan dan

Pokdarwis, teori mengenai model relasi sangat kompleks dan beragam macamnya sehingga agar mempermudah dan membantu peneliti di dalam menemukan jawaban penelitian dan tidak mengalami kebingungan data, maka pada penelitian ini akan dianalisis dengan melihat pada tiga model relasi yaitu harmoni, dominan, dan hegemoni.

Pertama, model harmoni merujuk pada hubungan relasi kekuasaan yang setara atau seimbang diantara tiap aktor yang ada di dalamnya. Hubungan dibangun berdasarkan kerjasama yang baik di dalam meraih tujuan bersama. Model ini dapat disebut sebagai kemitraan, Sutoro Eko (2014) mendefinisikan prinsip kemitraan memiliki rasa kesepahaman serta sikap saling menghormati berbagai usulan warga dalam melaksanakan *check and balances* (Eko et al., 2014). Kemudian, Gary Yukl (1991) mendefinisikan hubungan harmoni berarti pihak pertama dan kedua berada di level yang sama di mana mereka saling memiliki sikap percaya satu sama lain, bekerjasama dan menghargai sesamanya (Yukl & Falbe, 1991).

Kedua, Gramsci memahami bahwa dominan atau dominasi merujuk pada hubungan di mana suatu kelas sosial memiliki kekuasaan yang lebih besar/ dominasi daripada kelas sosial lainnya (Siswati, 2018). Sehingga, hanya satu kelas/kelompok yang memiliki akses terhadap pengelolaan sumber daya atau penguasaan sesuatu. Seperti pada kajian Khairul Amin (2017) penyelenggaraan pemerintahan di Desa Rias masih dimanipulasi para kelompok elit tertentu, dimana mereka menggunakan kuasanya untuk memposisikan masyarakat

bukan sebagai subjek kebijakan namun sebagai objek kebijakan. Kekuasaan para elit tersebut memunculkan bentuk relasi dominan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki kebebasan di dalam memberikan usulan maupun *feedback* atas penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di desanya (Amin, 2017).

Ketiga, hegemoni menurut Antonio Gramsci merupakan hubungan persetujuan/ negosiasi konsesus dan kepatuhan yang didapatkan dengan penguasaan politik dan ideologi para kelompok yang mendominasi (Siswati, 2018). Sehingga, lebih mudah dipahami bahwa hegemoni merupakan model dominasi kekuasaan yang berdasarkan persetujuan/konsesus bersama. Dalam konteks ini, negosiasi konsensus mengacu pada upaya mencapai kesepakatan politik dan ideologis yang meresap ke dalam berbagai kelompok sosial, baik yang dominan maupun yang didominasi, dengan tujuan membangun kehendak kolektif seluruh rakyat dan merebut kepemimpinan nasional.

Sehingga, agar pengelolaan embung sebagai sumber daya bersama dapat berhasil perlunya harmonisasi dalam relasi antara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis pada pengelolaan embung Nglanggeran. Para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang berharga mengenai pengelolaan embung Nglanggeran dan dapat membantu mengidentifikasi potensi permasalahan yang terjadi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya bersama, relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis melibatkan peran dan fungsi antara

Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya bersama. Pemerintah Kalurahan yang menyediakan sumber dana, memproteksi dan mendistribusi sumber daya dan membuat kebijakan untuk masyarakat dalam hal ini Pokdarwis. Sedangkan Pokdarwis yang mengelola sumber daya bersama dengan mengembangkan sumber daya lokal dan mengelola sumber daya bersama dengan seluruh elemen warga.

Relasi dari semua peran dan fungsi dari setiap pemangku kepentingan harus seimbang agar tidak terjadi konflik atau perebutan sumber daya. Pengelolaan sumber daya bersama yang kurang tepat dapat memunculkan fenomena *Tragedy of Common* (Hardin, 1968). Tragedi bersama dapat muncul apabila pengelolaan sumber daya diprivatisasi oleh sekelompok orang. Ostrom (1990) mengajukan *Common Pool Resource* (CPR) lebih baik diserahkan kepada komunitas lokal yang kelembagaannya dapat memproteksi CPR dan mengelola agar hasilnya efisien dan adil berdasar pada *consensus* warga agar tidak terjadi eksploitasi/privatisasi kelompok (Abisono et al., 2020). Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan memberikan manfaat bagi seluruh warga serta kesejahteraan warga setempat.

2. Pengelolaan *Common Pool Resources* (CPR) Embung Nglanggeran dan dampaknya bagi kemakmuran warga

Embung Nglanggeran adalah salah satu contoh *Common Pool Resources* atau sumber daya milik bersama. Sinar (2022) mendefinisikan *common pool resources (CPR)* yang disebut sumber daya milik bersama mengacu pada bentuk “kepemilikan bersama”. Hal tersebut merujuk terhadap pandangan dimana sumber daya milik bersama adalah milik publik yang berasal dari alamiah (Sinar, 2022). Konsep CPR perlu dimaknai sebagai subbagian dari barang-barang publik. Suatu barang dapat disebut CPR jika barang tersebut memiliki keterbatasan atau subtraktif pada konteksnya sebagai barang publik (Sakro, 2020). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa CPR adalah sumber daya alamiah ataupun sumber daya buatan yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang atau masyarakat, dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja.

Sumber daya bersama (CPR) meliputi sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk kehidupan dan pembangunan masyarakat, seperti sumber daya bersama dalam hal ini adalah embung Nglanggeran. Di dalam mengelola CPR terdapat dua pandangan yang berbeda tentang pengelolaannya. Pertama, solusi untuk mengendalikan penggunaan CPR yang *overuse* adalah dengan kendali dan *control* pemerintah (Hardin 1968, dalam Nursidah et al., 2012). Kedua, pengawasan dan pengelolaan CPR dilakukan oleh warga pengguna/komunitas lokal yang kelembagaannya dapat memproteksi CPR dan mengelola agar hasilnya terdistribusi secara efisien dan adil melalui tindakan kolektif/ aksi bersama (Brommley

1992; McGinnis & Ostrom 1996; Agrawal & Gibson 1999, dalam Nursidah et al., 2012).

Embung Nglanggeran merupakan salah satu contoh CPR di Kalurahan Nglanggeran. Embung ini merupakan sumber air dan sumber daya lokal bagi warga sekitar yang digunakan untuk kegiatan irigasi perkebunan durian dan kelengkeng yang ada di sekitar embung. Embung Nglanggeran merupakan sumber mata air yang sekaligus menjadi objek wisata unggulan di Kalurahan Nglanggeran. Sehingga, Embung Nglanggeran memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sumber air irigasi dan objek wisata.

Namun, pemanfaatan Embung Nglanggeran saat ini hanya diprivatisasi oleh sekelompok orang/komunitas, salah satunya adalah Pokdarwis dan Kelompok Tani. Akan tetapi jika mengacu pada hakikat dasarnya, pemanfaatan air Embung Nglanggeran seharusnya digunakan sebagai sumber mata air bersama yang tujuannya untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan kelompok/orang tertentu. Sehingga, penggunaan embung yang tidak dikelola dengan tepat akan bisa memicu permasalahan atau konflik antar pengguna seperti yang dikatakan Hardin tentang tragedi bersama (*Tragedy of Common*). Garet Hardin (1968) mengartikan tragedi bersama diakibatkan karena ketidakadaan hak milik dan kekuasaan tinggi atau high authority mengakibatkan eksploitasi berlebih. Sehingga, Hardin mengajukan solusi dimana CPR sebaiknya diprivatisasi atau dikontrol oleh negara (Hardin, 1968).

Beda halnya dengan Hardin, Elinor Ostrom (1990) mengajukan pengelolaan CPR dikelola oleh komunitas pengguna agar mencegah *Tragedy of Common*. Ostrom (1990) mengajukan sumber daya bersama (CPR) sebaiknya diserahkan kepada komunitas lokal yang kelembagaannya dapat memproteksi CPR dan mengelola agar hasilnya efisien serta adil berdasar pada consensus warga agar tidak terjadi over eksploitasi atau privatisasi kelompok (Abisono et al., 2020). Pengelolaan sumber daya lokal Embung Nglanggeran ini akan berpotensi menjadi common dilemma. Dilema yang umum terjadi dalam pengelolaan embung Nglanggeran adalah persaingan dan penguasaan yang dilakukan oleh Pokdarwis sebab pengelolaannya hanya dilakukan oleh komunitas kelompok pengelola. Selain itu, ketidakhadiran Pemerintah Kalurahan belum terdapat di dalam mengatur pengelolaan embung Nglanggeran dalam bentuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan embung agar memberikan manfaat yang merata.

Seperti pada kasus Telaga Jonge yang diteliti oleh Agustinus Sakro (2020), Pengelolaan sumber daya bersama (CPR) dengan basis masyarakat yaitu Pokdarwis yang berpedoman dengan model Elinor Ostrom pada realitasnya Pokdarwis malah mendominasi kekuasaan atas pengelolaan CPR. Terjadinya fenomena tersebut disebabkan oleh Pokdarwis yang tidak melibatkan desa, sehingga terjadilah tragedi privatisasi sumber daya bersama. Menelaah pada kajian Agustinus Sakro, alasan penyebab terjadinya fenomena CPR yang diprivat oleh Pokdarwis karena ketidakhadiran “negara”.

Kemudian, kajian lainnya tentang pengelolaan sumber daya bersama (CPR) dilakukan oleh Fatih Gama Abisono, Tridaya Rini, dan Agustinus Sakro (2020) yang mengkaji pengelolaan CPR dengan perspektif kewargaan memperkaya gagasan tentang pengelolaan CPR. Pada kajian ini, desa adalah “negara kecil”, dimana desa memiliki fungsi sebagai basis sosial, politik, pemerintahan, ekonomi, budaya, dan keamanan yang menjalankan fungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal sebagaimana fungsi dasar negara (Sutoro, Barori, dan Wiyono 2017, dalam Abisono et al., 2020). Kajian ini mengajukan gagasan bahwa desa perlu dilihat sebagai wujud politik yang memiliki kedaulatan dan mempunyai otonomi dimana desa berwenang untuk melaksanakan fungsinya seperti mengatur ketertiban sosial dan mendistribusikan kesejahteraan di dalam *Common Pool Resources /CPR*.

Pada realitasnya, tidak semua pengelola CPR berhasil memproteksi dan menerapkan pengelolaan CPR secara adil dan efisien. Keberhasilan di dalam mengelola CPR sangat dipengaruhi dengan beberapa faktor yang terkait dengan aksi bersama (Nursidah et al., 2012). Kajian yang dilakukan Nursidah (2012) menemukan bahwa model pengelolaan hutan nagari lebih cocok, karena model tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar untuk pengakuan hak masyarakat adat atas hutan kemasyarakatan, sampai kapasitas desa menjadi lebih baik. Nursidah menyebutkan pengelolaan hutan sebagai sumber daya bersama (CPR) lebih baik dikelola dengan pengelolaan

berbasis masyarakat lokal. Kajiannya lebih cenderung setuju terhadap model pengelolaan Elinor Ostrom dimana CPR dikelola oleh masyarakat penggunanya.

Sehingga, dapat peneliti simpulkan bahwa Pengelolaan CPR sebagai sumber daya lokal harus melibatkan desa di dalamnya, tentu peran dari Pokdarwis sebagai institusi lokal perlu dilibatkan pula di dalamnya, dimana sebagai institusi yang dapat memproteksi sumber daya dan mendistribusi hasilnya secara efisien dan adil berdasar pada konsensus warga agar tidak terjadi over eksploitasi atau privatisasi kelompok. Sumber daya bersama (CPR) harus dapat diakses oleh seluruh elemen warga bukan hanya kelompok tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan perlu mendistribusikan, mengatur, mengelola, dan melindungi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan embung Nglanggeran, karena Pemerintah Kalurahan merupakan representasi dari “negara kecil”, artinya Pemerintah Kalurahan berfungsi menjalankan fungsi dasarnya mengatur dan mengurus pengelolaan embung melalui kebijakan yang dibuat kolektif dan konsensus bersama warganya, melindungi hak-hak warganya dalam mengakses sumber daya dan redistribusi kesejahteraan warga.

Pengelolaan sumber daya bersama yang efektif seperti Embung Nglanggeran dapat memberikan dampak positif terhadap kemakmuran dan kesejahteraan warga lokal. Dalam melihat dan mencapai kemakmuran warga terdapat 3 aspek yang perlu dilakukan kalurahan, yaitu hidup, kehidupan, dan penghidupan. Ketiga konsep ini lahir dari

visi-misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang Reformasi Kalurahan. Pertama, Hidup merujuk pada eksistensi atau keberadaan seseorang atau sesuatu. Pada visi-misi Gubernur DIY, aspek hidup merupakan dimensi individu, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar warga, seperti: pangan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Dalam konteks kemakmuran warga desa, pengelolaan sumber daya bersama (CPR) dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan kualitas hidup warga, dimana tiap individu/warga dapat mengakses sumber daya air bersih, air irigasi dalam hal ini embung Nglanggeran.

Kedua, kehidupan merujuk pada kondisi atau cara hidup individu atau pergaulan masyarakat. Pada visi-misi Gubernur DIY, aspek kehidupan terkait dimensi sosial budaya, budaya masyarakat, hukum terkait perilaku masyarakat di ruang publik. Dalam konteks kemakmuran warga desa, pengelolaan sumber daya bersama (CPR) dikatakan berhasil apabila warga ikut berpartisipasi dan saling bekerjasama bahu-membahu ataupun adanya budaya gotong-royong di dalam mengelola sumber daya desanya untuk kepentingan bersama.

Sedangkan, penghidupan atau yang disebut *livelihood* adalah suatu kondisi yang menggambarkan pencaharian atau usaha yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan (Saragih et al., 2007). Adapun aspek penghidupan pada visi-misi Gubernur DIY merujuk pada dimensi ekonomi yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Aspek penghidupan dapat pula merujuk pada

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kemakmuran warga, pengelolaan sumber daya bersama (CPR) yang tepat dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan ekonomi warga sehingga kualitas penghidupan warga meningkat. Sutoro Eko (2014) dalam bukunya *Desa Membangun Indonesia* menyebutkan konsep hidup merujuk pada desa yang memiliki otonomi, sehingga desa tanpa otonomi maka desa tersebut tidak hidup, dan kedudukan desa dengan otonomi/kewenangan desa mengarah pada kehidupan dan penghidupan (Eko et al., 2014). Berbekal kewenangan yang dimiliki, desa diharapkan menjadi arena sekaligus basis penghidupan bagi masyarakatnya melalui aset yang dimilikinya (IRE, 2016).

Oleh karena itu, agar pengelolaan sumber daya bersama (CPR) dapat memberikan dampak kemakmuran bagi warga maka perlu dilakukan model pengelolaan yang tepat. Pengelolaan CPR yang dilakukan dengan baik akan dapat meningkatkan kemakmuran warga seperti yang dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup warga setempat, peningkatan kualitas kehidupan warga dan peningkatan perekonomian warga. Selain itu, dengan Pengelolaan sumber daya yang tepat akan dapat mencegah tragedi bersama seperti konflik internal dan mencegah adanya eksploitasi oleh sebagian komunitas/kelompok.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif, sehingga data-data yang didapat berupa kata, kalimat maupun gambar bukan merupakan data berupa angka-angka yang ditekankan pada proses daripada hasil/produk. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya menguraikan atau menggambarkan suatu peristiwa/fenomena sosial maupun fenomena alam yang disusun tersistematis, faktual, dan akurat. Penelitian Deskriptif memiliki kaitan yang erat dengan Pendekatan kualitatif, menurut Komariah dan Satori (2014), salah satu ciri dari pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yakni cara atau langkahnya menggambarkan sesuatu fenomena sosial yang penulisannya berbentuk naratif (Komariah & Satori, 2014).

Adapun pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif berdasarkan definisi dari Sugiyono (2013) merupakan metode penelitian yang melihat keadaan objek alamiah. Selain itu, Sugiyono juga menjelaskan bahwa peneliti adalah *key instruments* pada penelitian kualitatif, dengan cara mengumpulkan data biasanya melalui triangulasi/gabungan, analisis datanya secara kualitatif, dan temuan penelitiannya lebih menekankan maknanya bukan generalisasinya (Sugiyono, 2013).

2. Objek Penelitian

Menurut Arikunto (2009) objek penelitian adalah suatu hal yang mencakup dan menjadi fokus utama pengobservasian karena peneliti

membutuhkan data dari ‘suatu hal’ itu (Arikunto, 2009). Objek penelitian juga dapat didefinisikan sebagai fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjawab persoalan penelitian. Sugiyono (2013) menyebutkan objek penelitian pada penelitian kualitatif disebut keadaan sosial, dimana terdiri dari tiga unsur yaitu tempat, aktivitas dan aktor (Sugiyono, 2013). Objek pada penelitian peneliti adalah Relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam pengelolaan Embung Nglanggeran.

3. Subjek dan Lokasi Penelitian

Menurut Arikunto (2013), subjek penelitian tidak serta-merta adalah manusia/orang, tapi bisa pula berupa suatu barang, aktivitas dan tempat (Arikunto, 2013). Pada penelitian peneliti, subjek penelitiannya merupakan Pemerintah Kalurahan Nglanggeran, masyarakat Desa Nglanggeran, Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Tani kebun buah, dan pelaku usaha di Embung Nglanggeran. Lokasi Penelitian dilakukan di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun teknik yang digunakan peneliti di dalam penentuan narasumber adalah teknik *Purposive sampling*. *Purposive Sampling* ialah cara memilih narasumber penelitian melalui beberapa pertimbangan. Peneliti memilih *purposive sampling* dikarenakan peneliti mempunyai pertimbangan tertentu di dalam memilih informan/narasumber tersebut seperti orang yang menurut peneliti dianggap paling memahami dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Sugiyono (2013) menjelaskan teknik *purposive sampling* merupakan cara pemilihan informan melalui

pertimbangan tertentu. Seperti informan yang dirasa paling mengetahui permasalahan penelitian, sehingga mempermudah peneliti di dalam mengeksplorasi objek penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2013). Adapun yang menjadi Informan bagi sumber data penelitian ini antara lain:

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1.	Widada	Lurah Nglanggeran	64 Tahun
2.	Triyanta	Ulu-ulu Nglanggeran	42 Tahun
3.	Nur Iksan	Jagabaya Nglanggeran	37 Tahun
4.	Mursidi	Ketua Pokdarwis	52 Tahun
5.	Faizal	Bendahara Pokdarwis	23 Tahun
6.	Suwarna	Anggota Pokdarwis	42 Tahun
7.	Susil	Warga	53 Tahun
8.	Niyem	Pelaku usaha di embung	61 Tahun
9.	Tumiran	Pengurus Kebun Buah Kencono Mukti	50 Tahun

Sumber: Diolah dari data lapangan peneliti, 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam memperoleh data-data penelitian, bentuk tahapan yang dilakukan yakni sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan metode mengumpulkan data melalui teknik mengamati secara langsung bagaimana kondisi lokasi penelitian serta pendataan yang sistematis tentang objek penelitian yang dikaji. Menurut Sugiyono (2013) Observasi adalah kegiatan yang melibatkan studi objek (Sugiyono, 2013). Peneliti akan mengamati bagaimana relasi Pemerintah Kalurahan dan kelompok

sadar wisata di dalam mengelola embung. Peneliti melakukan penelitian di Kalurahan Nglanggeran dengan observasi secara langsung ke lokasi penelitian agar mendapatkan data primer sebagai catatan lapangan peneliti.

Pada saat observasi, peneliti memilah-milah hal-hal yang akan diobservasi serta menulis apa saja yang memiliki keterkaitan dengan topik peneliti. Adapun observasi yang peneliti lakukan adalah fokus pada Embung Nglanggeran yang menjadi lokasi penelitian. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam pengelolaan embung sebagai CPR dan bagaimana dampak pengelolaan *common pool resources* bagi kemakmuran warga.

2) Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah metode dalam mengumpulkan data melalui bertanya *face to face* kepada informan/narasumber mengenai hal-hal/permasalahan penelitian yang diteliti. Teknik wawancara yang dipakai peneliti yaitu wawancara bebas terpimpin. Arikunto (2013) mengartikan bahwasanya wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara yang dimana pertanyaannya diajukan secara improvisasi akan tetapi tidak terlepas dan tetap sesuai dengan *interview guide* yang sudah dibuat. Sehingga, pertanyaan wawancara dapat dikembangkan ketika sedang mewawancarai narasumber. Peneliti memperoleh informasi langsung dengan mewawancarai Pemerintah Kalurahan, Pokdarwis,

Masyarakat, Kelompok Tani kebun buah dan pelaku usaha di Embung Nglanggeran.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data seperti, mengambil foto atau gambar ketika proses wawancara dengan responden berlangsung atau gambar yang diperoleh ketika melakukan observasi/pengamatan, dapat juga dengan memperoleh data-data maupun informasi seperti pada buku, transkrip, jurnal ilmiah, artikel, tesis dan lain-lain. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian yaitu transkrip wawancara, profil desa, foto/gambar, RKPdes dan dokumen-dokumen penting lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Menurut definisi dari Sugiyono (2013) analisis data kualitatif yaitu cara mencari dan proses susun-menyusun data agar tersistematis. Data ini didapatkan dari hasil wawancara informan, observasi di lokasi, dan dokumentasi, dilakukan dengan mengklasifikasikan data, kemudian data diuraikan menjadi unit-unit, lalu disusun membentuk pola. Selanjutnya memilah data yang pokok, serta membuat kesimpulan akhir yang dapat dimengerti.

Di dalam menganalisis data peneliti menggunakan tahapan menurut Sugiyono. Sugiyono (2013) menguraikan bahwa teknik analisis data terbagi dalam tiga tahapan antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Mengacu pada uraian di atas, berikut tahapan di dalam menganalisis data, diantaranya:

1) Reduksi Data

Kumpulan data yang didapatkan di tempat penelitian memiliki jumlah yang beraneka macamnya, oleh karena itu perlu ditulis secara cermat dan rinci serta perlu sesuai dengan fokus penelitian yang sudah dibuat. Dalam bukunya Sugiyono (2013) menjelaskan bahwasanya reduksi data merupakan kegiatan meringkas, memilah data yang akan diperlukan, serta mencari tema dan modelnya. Dengan kata lain, data yang sudah direduksi bisa menghasilkan pandangan dan gambaran yang tepat, serta mempermudah peneliti di dalam mencari data-data berikutnya.

2) Penyajian Data

Sugiyono, (2013) menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif, data yang disajikan berupa uraian singkat, kategori yang berkaitan, *flowchart* dan lain-lain. Bentuk penyajian data bersifat sederhana dan jelas agar peneliti dapat menganalisis, memahaminya dan dapat bertindak ke tahap berikutnya yakni menarik kesimpulan. Pada penelitian ini, data-data yang akan disajikan merupakan hasil wawancara dengan responden yaitu Pemerintah Kalurahan, Pokdarwis, Masyarakat, Kelompok Tani Kebun Buah, dan pelaku usaha di Embung Nglanggeran.

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwasanya kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan-temuan baru dan belum dilakukan oleh orang lain. Penarikan kesimpulan pula merupakan hasil yang menggambarkan atau pendeskripsian hal yang tadinya belum jelas menjadi jelas setelah diteliti. Dengan demikian, penarikan kesimpulan harus ditarik dengan ketelitian dan kecermatan yang kuat, agar hasil kesimpulan yang ditarik peneliti bervaliditas baik, bereksistensi tinggi dan memiliki kesesuaian dengan tujuan penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN

A. Sejarah Kalurahan

Nglanggeran berasal dari kata Pelanggeran yang berarti batas pelanggaran, yang artinya setiap perilaku jahat yang ingin ditujukan ke wilayah Nglanggeran pasti pelakunya tertangkap. Sejarah berdirinya Nglanggeran dapat dikatakan sebagai cerita *urband legend* dibandingkan dengan sejarah, karena sampai saat ini sejarah mengenai Nglanggeran masih belum terkonfirmasi. Mengacu pada Website Kalurahan Nglanggeran, warga Nglanggeran mempercayai pendiri desanya adalah Manguntirto atau dikenal juga menggunakan nama Mbah Gendruk. Manguntirto dikatakan sebagai tokoh pertama yang membangun pemukiman di Nglanggeran. Manguntirto pula dikisahkan berperang melawan penjajahan Belanda.

Gunung Nglanggeran dijadikan sebagai daerah persembunyian oleh Manguntirto dan di sanalah Manguntirto menciptakan sebuah pemukiman. Fakta bahwa Manguntirto membangun pemukiman terdengar hingga ke Keraton Ngayogyakarta. Masyarakat yang mengetahui hal tersebut banyak yang berpindah serta memutuskan untuk tinggal di sana sehingga menciptakan pemukiman dan menjadi sebuah desa. Desa tersebut diberi nama "Pelanggeran". Pihak Keraton pun menunjuk Manguntirto menjadi kepala desa. Kemudian, Manguntirto menikahi seorang wanita dari desa Nglegi. Sutodipo yang merupakan anaknya Manguntirto akhirnya menggantikan ayahnya sebagai

kepala desa. Pada masa pemerintahan Sutodipo, terjadi pergantian nama Desa Pelanggeran menjadi Desa Nglanggeran yang dikenal sampai saat ini.

Pada mulanya Nglanggeran berbentuk kelurahan/desa. Kemudian, sebutan Desa Nglanggeran berubah menjadi Kalurahan Nglanggeran. Hal ini karena adanya perubahan pada nomenklatur baru di wilayah DIY dimana panggilan lain untuk desa disebut menjadi kalurahan.

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Nglanggeran merupakan kalurahan yang berada di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun luas wilayah Kalurahan Nglanggeran memiliki luas sebesar 762.8 ha yang terdiri dari lahan perkebunan, pertanian, peternakan, hutan, ladang maupun tanah pekarangan.

Wilayah Nglanggeran terbagi menjadi 5 padukuhan/dusun yaitu Dusun Doga, Dusun Karang Sari, Dusun Nglanggeran Wetan, Dusun Nglanggeran Kulon dan Dusun Gunungbutak. Adapun pusat pemerintahan Kalurahan Nglanggeran berada di Padukuhan Doga. Di sisi lain, berdasarkan pada batas wilayah Kalurahan Nglanggeran pula berbatasan dengan kalurahan lainnya, yakni:

Tabel 2. 1 Batas Wilayah Administrasi Kalurahan Nglanggeran

No	Arah Batas	Kalurahan	Kapanewon
1	Sebelah Utara	Ngoro-oro	Patuk
2	Sebelah Selatan	Putat	Patuk
3	Sebelah Barat	Salam	Patuk
4	Sebelah Timur	Nglegi	Patuk

Sumber: Website Kalurahan Nglanggeran, 2023.

Adapun besaran luas wilayah Nglanggeran dengan total luas wilayah sebesar 762.8 ha terdiri dari Dusun Karang Sari dengan luas wilayah 123.30 ha, Dusun Doga dengan luas wilayah 132.10 ha, Dusun Nglanggeran Kulon dengan luas wilayah 122.10 ha, Dusun Nglanggeran Wetan dengan luas wilayah 210.10 ha dan Dusun Gunungbutak dengan luas wilayah 175.20 ha. Kemudian secara orbitrasi, jarak tempuh Kalurahan Nglanggeran dari pusat kapanewon adalah sekitar 4 Km, lalu jarak dari Pusat Kabupaten sekitar 22 Km, sedangkan jarak tempuh ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke Nglanggeran yaitu sekitar 25 Km.

Selanjutnya, karena Kalurahan Nglanggeran merupakan salah satu kalurahan yang telah banyak meraih penghargaan-penghargaan desa wisata terbaik tingkat nasional maupun tingkat internasional, tentunya banyak wisatawan yang penasaran dan ingin berkunjung ke Nglanggeran. Di dalam mempermudah pengunjung maupun wisatawan untuk datang berwisata ke Nglanggeran, Pemerintah Kalurahan telah memberikan informasi baik berupa peta wilayah dan informasi wisata pada websitenya yaitu website Pemerintah Kalurahan dan website Gunung Api Purba Nglanggeran. Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis memberikan tampilan mengenai gambaran peta wilayah Kalurahan Nglanggeran pada website Gunung Api Purba Nglanggeran sebagai penyampaian informasi bagi wisatawan yang ingin berkunjung dan berwisata di Nglanggeran. Adapun gambar peta tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

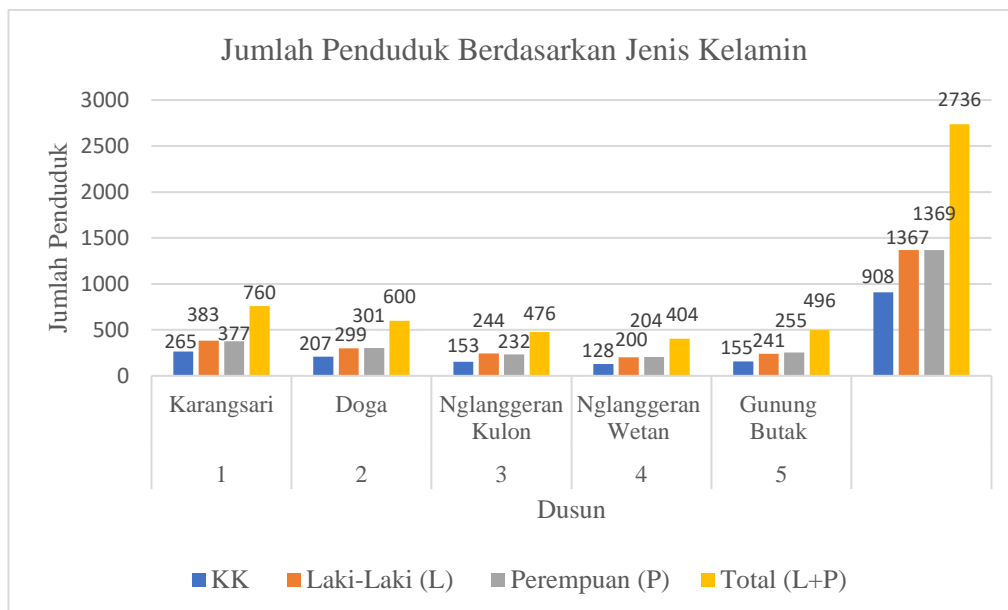


Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Nglangeran

Sumber: Website Gunung Api Purba, 2023.

C. Kondisi Demografis

Kalurahan Nglangeran terdiri dari 5 dusun/padukuhan dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 908 KK, total Jumlah penduduknya sebanyak 2.736 jiwa, dengan jumlah laki-laki 1.367 jiwa dan perempuan 1.369 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak pada tahun 2023 terletak di Padukuhan Karangsari sejumlah 706 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terletak di Padukuhan Nglangeran Wetan yang hanya sejumlah 404 jiwa. Adapun Rincian jumlah penduduk kalurahan pada tiap padukuhan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data diolah dari arsip Kalurahan Nglanggeran, 2023.

Kemudian, berdasarkan pada data monografi Kalurahan Nglanggeran, sebagian besar mata pencaharian penduduk Kalurahan Nglanggeran adalah petani, dimana jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani sebanyak 753 orang dan sebagian lainnya terdiri dari buruh, pedagang, industri rumah tangga, wiraswasta, PNS, karyawan swasta, pamong dan lainnya. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah
1	Petani/Perkebunan	753
2	Belum/Tidak Bekerja	497
3	Karyawan Swasta	245
4	Mengurus Rumah Tangga	336
5	Wiraswasta	201
6	Buruh Harian Lepas	199

7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	29
8	Pamong	14
9	Pensiunan	12
10	Lainnya	450

Sumber: Data diolah dari arsip Kalurahan Nglanggeran, 2023.

Selanjutnya, berikut disajikan jumlah penduduk masyarakat Nglanggeran berdasarkan tingkat pendidikannya. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	541
2	Tidak Tamat SD	248
3	Sekolah Dasar (SD)	642
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	621
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	596
6	Diploma I/II	13
7	Diploma III	19
8	Strata I	56
	TOTAL	2.736

Sumber: Data diolah dari arsip Kalurahan Nglanggeran, 2023.

Berdasarkan pada data di atas, mayoritas masyarakat Nglanggeran berada pada tingkat pendidikan yang belum begitu tinggi. Hal ini dapat dilihat dimana jumlah yang paling banyak berada pada tingkat SD atau pendidikan dasar yaitu sebesar 642 jiwa. Namun, sangat disayangkan pula bahwa jumlah masyarakat yang tidak bersekolah mencapai 541 jiwa. Di samping itu, jumlah penduduk yang sudah berpendidikan/bersekolah dirasa sudah cukup banyak.

D. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

Dengan adanya Kawasan wisata Kalurahan Nglanggeran kini penduduk Kalurahan Nglanggeran banyak yang mengembangkan usaha industri rumah tangga berupa makanan olahan (Ceriping singkong, dodol kakao, Lanting, ceriping Pisang, Brownis Singkong) dan kerajinan tangan. Dalam bidang pertanian Kalurahan Nglanggeran sangat berpotensi. Hasil pertanian seperti : padi, sayuran dan palawija banyak dihasilkan di Kalurahan Nglanggeran. Masyarakat Nglanggeran juga mengembangkan bidang peternakan seperti : Sapi, Kambing, Ayam, dan Budidaya Ikan Lele. Di bidang perkebunan, khususnya coklat juga berkembang sangat baik.

Lima padukuhan di Kalurahan Nglanggeran memiliki potensi untuk lahan perkebunan dan buah-buahan. Tanaman Kakao adalah tanaman yang paling banyak dijumpai selain tanaman lain seperti Mlinjo, Petai, Jengkol dan tanaman perkebunan lainnya. Rambutan, Durian, Mangga dan pisang adalah Tanaman buah-buahan yang banyak ditanam di Kalurahan Nglanggeran. Namun, Kakao adalah hasil panen terbesar yang mampu dihasilkan dan dapat menopang ekonomi masyarakat Nglanggeran. Dengan adanya kawasan Eko Wisata, perekonomian di Kalurahan Nglanggeran lebih meningkat. Masyarakat lebih kreatif untuk menarik para wisatawan/pengunjung dengan hasil kerajinan dan aneka olahan makanan yang dibuat sendiri.

Selanjutnya, dilihat dari kondisi sosial budaya, budaya masyarakat Kalurahan Nglanggeran yang selama ini menjadi kekuatan membangun Kalurahan adalah rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Kalurahan Nglanggeran saat ini masih menerapkan tradisi tradisional. Hal itu

dikarenakan masih banyaknya kebudayaan yang bersifat tradisional diantaranya: Bersih Dusun/Rasulan, Kirab Budaya, dan Upacara adat tradisional lainnya. Adapun gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan secara spontan dan sukarela antara warga Kalurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adat/tradisi tersebut saat ini dikemas menjadi aset wisata yang mampu mendatangkan wisatawan sehingga menambah pendapatan masyarakat setempat. Di Kalurahan Nglanggeran terdapat wisata budaya yang dikemas dalam event *Nglanggeran Culture Festival*. Wisata budaya tersebut terdiri dari berbagai budaya yang masih terjaga kelestariannya seperti Kenduri, Kembul Bujana, Tari Tayub, Gejog Lesung, Jatilan, Reog dan Wayang.

E. Visi Dan Misi Kalurahan

1. Visi

“Terbentuknya Pemerintah Kalurahan Yang Profesional, Jujur, Adil, Dan Bijaksana Dalam Mengemban Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Makmur Sejahtera”.

2. Misi

- 1) Mewujudkan Pemerintah Kalurahan yang berkualitas dan responsif
- 2) Mewujudkan Kalurahan Nglanggeran sebagai tempat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan alam secara maksimal.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan aktif dalam pembangunan dan mandiri melalui pembinaan, pengarahan, dan perlindungan.

- 4) Mewujudkan pengembangan dunia usaha mikro dan koperasi melalui peningkatan etos kerja masyarakat dengan kuatnya kultur masyarakat.

Adapun, visi-misi Lurah Nglanggeran periode 2021-2026 yakni:

1. Visi

“Gotong Royong Membangun Kalurahan Mandiri yang Adil, Jujur, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”.

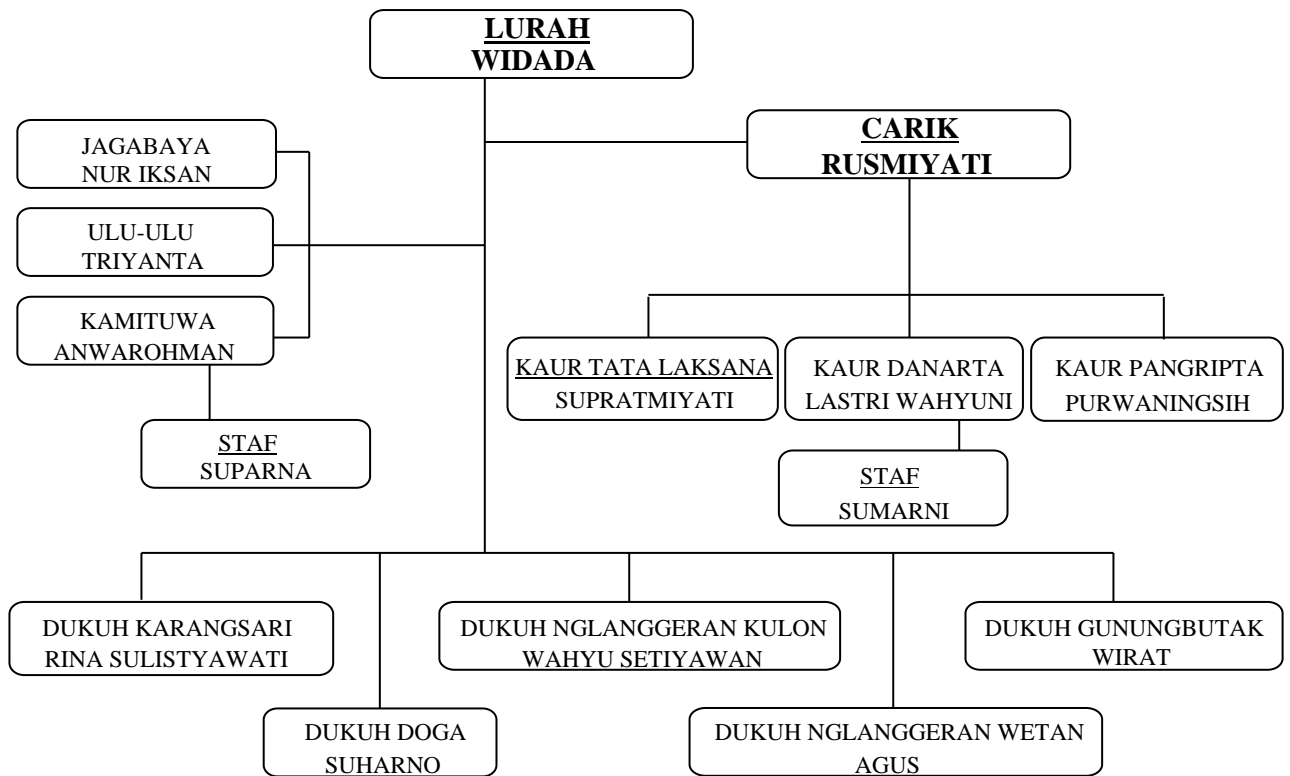
2. Misi

- 1) Mewujudkan Pemerintah Kalurahan yang Jujur dan Berwibawa dengan Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Tepat.
- 2) Mengedepankan Kejujuran dan Musyawarah Mufakat dalam Kehidupan sehari-hari baik dengan Pemerintah maupun dengan Masyarakat Kalurahan.
- 3) Meningkatkan Profesional dan mengaktifkan seluruh Pamong Kalurahan.
- 4) Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kalurahan yang memadai.
- 5) Mewujudkan Perekonomian Kalurahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan.
- 6) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kalurahan Yang Maksimal.

F. Struktur Organisasi Kalurahan

Adapun struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Nglanggeran dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Nglanggeran



Terdapat penyebutan secara khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan. Berikut ini merupakan Daftar Nama Pamong Kalurahan (Perangkat Desa) Nglanggeran:

- 1) Widada : Lurah (Kepala Desa) Nglanggeran
- 2) Rusmiyati : Carik (Sekretaris Desa)
- 3) Nur Iksan : Jagabaya (Kepala Seksi Pemerintahan)
- 4) Triyanta : Ulu-ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan)
- 5) Anwarohman : Kamituwa (Kepala Seksi Pelayanan)
- 6) Purwaningsih : Kaur Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan)
- 7) Lastri Wahyuni : Kaur Danarta (Kepala Urusan Keuangan)
- 8) Supratmiyati : Kaur Tata Laksana (Kepala Urusan Tata Usaha dan

Umum)

- 9) Rina Sulistyawati : Dukuh (Kepala Dusun) Karang Sari
- 10) Suharno : Dukuh (Kepala Dusun) Doga
- 11) Wahyu Setiyawan : Dukuh (Kepala Dusun) Nglanggeran kulon
- 12) Agus : Dukuh (Kepala Dusun) Nglanggeran Wetan
- 13) Wirat : Dukuh (Kepala Dusun) Gunungbutak
- 14) Suparna : Staf Pamong kalurahan (Staf Perangkat Desa)
- 15) Sumarni : Staf Pamong kalurahan (Staf Perangkat Desa)

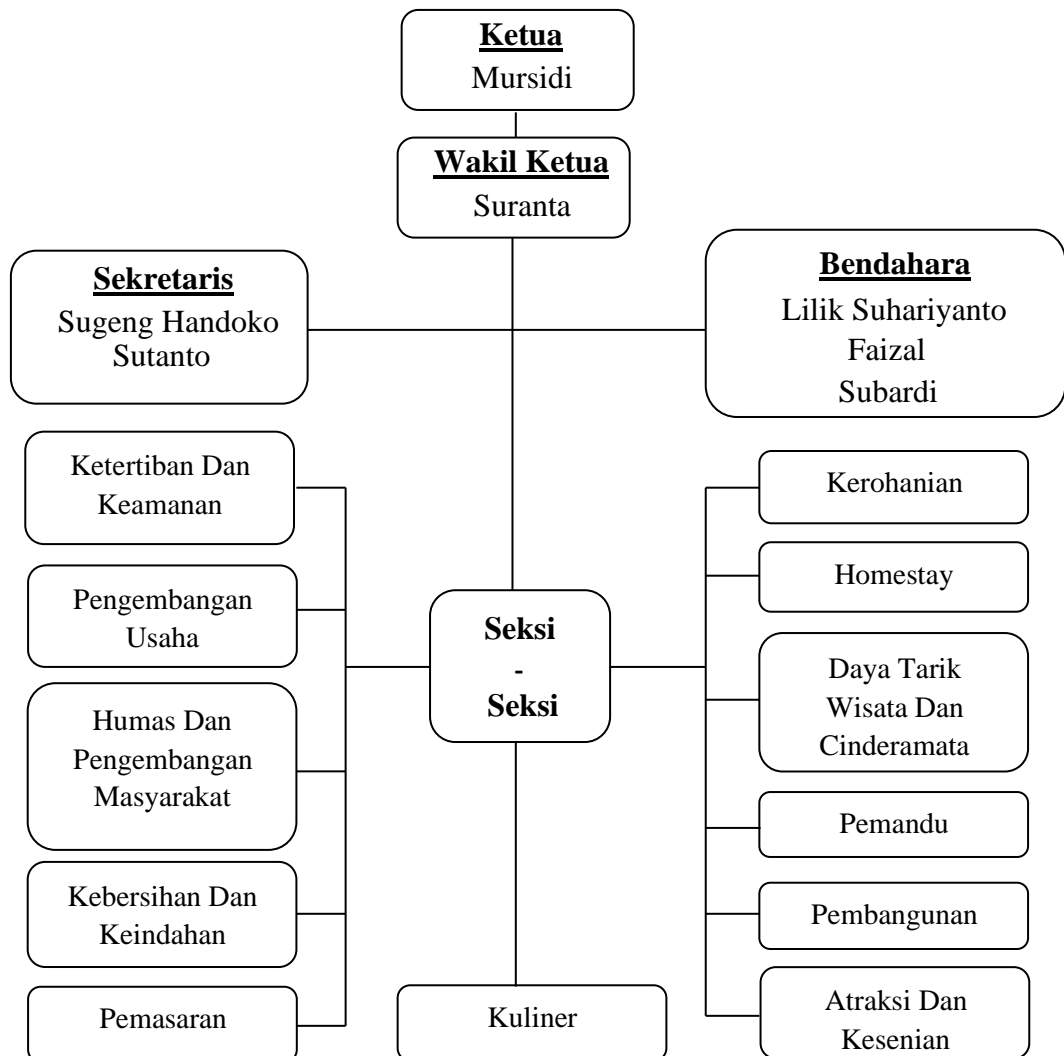
G. Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Berdasarkan pada informasi yang terdapat di dalam website Kalurahan Nglanggeran, awal mula dibentuknya Pokdarwis ini dimulai dengan adanya sekelompok pemuda karang taruna Kalurahan Nglanggeran yang bertujuan untuk mengelola Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba sejak tahun 1999. Pada mulanya, masyarakat bersama para pemuda-pemudi Nglanggeran sekitar mulai melakukan reboisasi gunung yang gersang. Kegiatan ini membuat Pemerintah Kalurahan mempercayakan para pemuda di dalam mengelola lahan Gunung Api Purba kepada Karang Taruna Bukit Putra Mandiri.

Pada tahun 2007, dengan didampingi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul dibentuklah sebuah lembaga Badan Pengelola Desa Wisata (BPDW) yang terdiri dari Anggota Karang Taruna, PKK, Kelompok Ternak, Kelompok Tani, pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Pada tahun 2008, BPDW ini kemudian berganti nama menjadi Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Hal ini dilakukan agar sesuai dengan program pemerintah pusat yang

menggiatkan daerah untuk menggerakkan pariwisata melalui Pokdarwis. Pokdarwis ini merupakan institusi lokal dimana anggotanya adalah masyarakat setempat yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap potensi wisata. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Ngglanggeran tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nglanggeran Nomor 30/KPTS/2013. Adapun struktur organisasi Pokdarwis sebagai berikut:

Bagan 2. 2 Struktur Organisasi Pokdarwis



Pokdarwis Nglanggeran telah menjadi institusi lokal yang dibentuk atas inisiasi dari warga setempat yang memiliki tujuan untuk memajukan dan mengembangkan potensi wisatanya. Pokdarwis Nglanggeran kini mengelola tiga objek wisata unggulan di Nglanggeran. Salah satunya yaitu kawasan Embung Nglanggeran. Berikut ini adalah foto embung Nglanggeran dari salah satu pengunjung yang datang ke wisata embung Nglanggeran:



Gambar 2. 3 Embung Nglanggeran

Sumber: Website Visiting Jogja Istimewa

Gambar di atas merupakan Embung Nglanggeran yang pengelolaannya dikelola oleh Pokdarwis dengan dipergunakan dan dimanfaatkan mata airnya untuk pengairan kebun buah di sekitarnya yaitu kebun buah durian dan kelengkeng, selain itu embung ini juga menjadi salah satu objek wisata unggulan di Nglanggeran yang diresmikan pada 19 Februari 2013 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Embung yang dibangun di atas puncak perbukitan tersebut menjadi tempat favorit para wisatawan untuk melihat *sunset* dan

keindahan alam dengan latar belakang keindahan Gunung Api Purba Nglanggeran.

Selain Embung Nglanggeran yang menjadi objek wisata unggulan di Nglanggeran, objek yang pertama kali dikelola dan didukung oleh para pemuda di Nglanggeran dan dikelola oleh Pokdarwis adalah kawasan ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Berdasarkan informasi pada website Gunung Api Purba, gunung ini merupakan gunung Merapi yang aktif pada 60 juta tahun lalu dan didominasi oleh batuan kapur. Biasanya Gunung Api Purba dijadikan sebagai tempat berkemah, *tracking*, tempat penelitian sebagai salah satu Geopark Oleh UNESCO maupun sebagai spot favorit untuk menikmati *sunrise* maupun *sunset*. Berikut ini dapat dilihat foto keindahan Gunung Api Purba ketika menjelang tenggelamnya matahari.



Gambar 2. 4 Gunung Api Purba Nglanggeran

Sumber: website Gunung Api Purba

Gambar di atas adalah foto Gunung Api Purba ketika fenomena *golden sunrise* atau ketika matahari mulai tenggelam. Para wisatawan biasanya menikmati *view sunrise* dan *sunset* di puncak Gunung Api Purba sebelah barat

yang disebut Gunung Gedhe. Selain Gunung Gedhe, beberapa lokasi yang sering dikunjungi wisatawan di Gunung Api Purba yaitu Gunung Bagong, Gunung Lima Jari, Gunung Buchu, Comberan, dan Gunung Wayang. Di sisi sebelah timur Gunung Api Purba terdapat objek wisata Kampung Pitu (Kampung Tujuh) yang dikenal memiliki cerita rakyat dimana hanya boleh dihuni oleh tujuh kepala keluarga.

Objek wisata unggulan selanjutnya yang dikelola oleh Pokdarwis adalah Air Terjun Kedung Kandang. Objek wisata ini dapat dinikmati dari sebelah Selatan Gunung Api Purba. Air terjun ini memiliki keunikan karena terletak di antara terasiring sawah dan memiliki bentuk yang bertingkat-tingkat dan bersusun batuan vulkanik. Gambar Air Terjun Kedung Kandang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 5 Air Terjun Kedung Kandang

Sumber: Website Gunung Api Purba

Gambar di atas adalah Air Terjun Kedung Kandang yang hanya dapat diperoleh view yang indah ketika musim penghujan, karena ketika musim penghujan aliran air terjun ini akan terlihat cantik dengan dibaluti pemandangan

batuan vulkanik besar yang dialiri air dan tumbuhan hijau disekitarnya yang memberikan kesan menawan.

Objek wisata lainnya yang mendukung ketiga objek wisata unggulan di Nglanggeran yaitu terdapat rumah produksi coklat yang disebut dengan Griya Coklat Nglanggeran. Coklat yang bersumber dari tanaman kakao adalah tanaman yang paling banyak dijumpai di Nglanggeran. Kakao adalah hasil panen terbesar yang sudah mampu dihasilkan dan dapat menopang ekonomi masyarakat Nglanggeran. Foto Griya Coklat Nglanggeran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 6 Griya Coklat Nglanggeran

Sumber: Website Visiting Jogja Istimewa

Griya Coklat Nglanggeran adalah pusat produksi dan oleh-oleh coklat khas Nglanggeran dimana pengunjung bisa belajar cara membuat dan mencicipi hasil olahan coklatnya. Selain itu, aneka makanan dan minuman olahan coklat dapat dibeli pengunjung sebagai oleh-oleh dari Nglanggeran. Griya Coklat ini adalah bentuk inovasi kalurahan yang dikelola oleh warga lokal baik dari kelompok tani, kelompok kuliner Purbarasa, dan Pokdarwis Nglanggeran.

Selain Griya Coklat, terdapat pula peternakan kambing etawa bagi para pengunjung yang ingin melihat cara pengolahan susu kambing etawa. Wisata edukasi peternakan kambing etawa ini juga merupakan bentuk inovasi kalurahan yang dikelola oleh kelompok ternak Purbaya.



Gambar 2. 7 Edukasi Peternakan Kambing Etawa

Sumber: Website Gunung Api Purba

Gambar di atas adalah proses pembelajaran cara memeras susu kambing etawa yang termasuk ke dalam kegiatan edukasi wisata. Di dalam kegiatan wisata edukasi ini para wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan kambing etawa, memberikannya makan, dan belajar cara pemerasan susu kambing etawa bahkan dapat mencicipi susu etawa yang telah diolah.

Banyaknya aneka objek wisata yang dikelola Pokdarwis Nglanggeran maupun kelompok-kelompok masyarakat di Nglanggeran sudah dapat menjadikan Kalurahan Nglanggeran menjadi kalurahan yang berhasil mengelola potensinya melalui institusi lokal. Kemajuan Nglanggeran yang dipengaruhi adanya institusi lokal telah berhasil memberikan berbagai macam penghargaan bagi kalurahan baik perolehan penghargaan nasional hingga penghargaan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisono, F. G., Rini, T., & Sakro, A. (2020). The Commons dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam Desa Bleberan Gunungkidul. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1), 28–41. <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.422>
- Amin, K. (2017). Elite Dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa: Studi Relasi Antara Pemerintah dan Masyarakat di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. *Jurnal Sosiologi USK*, 11(2), 167–187.
- Arikunto. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Darwis, R. S., Resnawaty, R., Irfan, M., & Risman, A. (2016). Peran Institusi Lokal Dalam Kegiatan Pengembangan Masyarakat: Kasus Punggawa Ratu Pasundan Dalam Program Desa Wisata Di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 253. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13213>
- Davies, A. L., & White, R. M. (2012). Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland. *Journal of Environmental Management*, 112, 160–169. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.07.032>
- Eko, S., Barori, M., & Hastowiyono. (2017). *Desa Baru Negara Lama*. Pascasarjana STPMD “APMD.”
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastowiyono, Suharyanto, & Kurniawan, B. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248. <http://www.jstor.org/stable/1724745>
- Harmawan, B. N., Wasiati, I., & Rohman, H. (2017). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. *E-Sospol*, 4(1), 50–55.
- IRE. (2016). Reforma Agraria dari Desa. *Institute for Research and Empowerment*, 1–4.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>

- Komariah, A., & Satori, D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabetha.
- Nursidah, Nugroho, B., Darusman, D., Rusdiana, O., & Rasyid, Y. (2012). Pengembangan Institusi untuk Membangun Aksi Kolektif Lokal dalam Pengelolaan Hutan Kawasan Lindung SWP DAS Arau, Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 18(1), 18–30. <https://doi.org/10.7226/jtfm.18.1.18>
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan.
- Petrus, K. A. (2008). *Pengembangan institusi Lokal: Studi Kasus Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sumber Agung, Gunung Betung-Lampung*. Disertasi, Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Purnomo, H., Widiputranti, C. S., & Hartono. (2021). Kolaborasi Stakeholder dalam Tata Kelola Telaga Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 1(1), 87–102. <https://doi.org/10.47431/jmd.v1i1.129>
- Putra, A. I. P., & Roni, M. (2021). Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance). *Jurnal Kependidikan Islam*, 11(2), 227–236. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v1i1i2.10065>
- Putrawan, P. E., & Ardana, D. M. J. (2019). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 40–54.
- Putri, A. A., & Sihaloho, M. (2018). Akses Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(5), 681–692. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.681-692>
- Raharjo, S. A. S., Falah, F., & Cahyono, S. A. (2019). *Germadan Rawa Pening: Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan Common Pool Resources*. 3(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.20886/jppdas.2019.3.1.1-12>
- Sakro, A. (2020). Sumber Daya Bersama, Kontestasi, Hadirnya Spirit Berdesa : Studi Kasus Pengelolaan Telaga Jonge Desa Pacarejo, Kabupaten Gunungkidul. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(2), 200–221. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.87>
- Sambodo, G. T., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 3(1), 95–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v3i1.2140>
- Sanjaya, R. B. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 5(1), 91–110. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p05>

- Saragih, S., Lassa, J., & Ramli, A. (2007). *Kerangka Penghidupan Berkelanjutan Sustainable Livelihood Framework*.
- Sinar, S. (2022). *Pengelolaan Common Pool Resources: Mencari Titik Temu Antara Modal Sosial dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bamping Opak Asri*. Skripsi Tidak dipublikasikan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta.
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 5(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Siswoyo, M., Komara, A., Siddiq, D. M., Putra, Y. P., & Lestari, I. (2022). Social Learning Theory dalam Pemodelan Pengembangan Wisata Embung Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 6(2), 189–202. <https://doi.org/10.33603/jibm.v6i2.7617>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Taylor, B., & de Loë, R. C. (2012). Conceptualizations of local knowledge in collaborative environmental governance. *Geoforum*, 43(6), 1207–1217. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.03.007>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Winasis, A., & Setyawan, D. (2016). Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 12–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v5i2.235>
- Yukl, G., & Falbe, C. M. (1991). Importance of Different Power Sources in Downward and Lateral Relations. *Journal of Applied Psychology*, 76(3), 416–423. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.76.3.416>
- Yunanto, S. E. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>

Website:

desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id

gunungapipurba.com

visitingjogja.jogjaprovo.go.id